



Media: Radar

Hari: Jumat

Tanggal: 29 Januari 2021

Halaman: 9

Pandemi, Moratorium Diperpanjang

Legislator Minta Manajemen Hotel Virtual Diawasi

JOGJA, Radar Jogja - Pemkot Jogja kembali memperpanjang moratorium atau penundaan izin mendirikan bangunan (IMB) hotel baru di Kota Jogja. Moratorium diperpanjang sampai dengan 31 Desember mendatang.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) mengatakan, pertimbangan perpanjangan moratorium pendirian hotel baru tersebut juga didasarkan atas kondisi ekonomi sosial saat ini. Tanpa adanya perpanjangan pun dipastikan investor akan menahan untuk pendirian hotel baru. "Masih seperti yang dulu perpanjang lagi. Tapi sekarang *sopo sek arep* bangun, saya rasa secara realistis tidak akan ada lah situasi kayak gini," katanya di Grha Pandawa Ba-

lai Kota kemarin (28/1).

Perpanjangan moratorium melalui Perwal Kota Jogja Nomor 150/2020 ini tetap dengan pengecualian terhadap hotel bintang empat dan lima. Sehingga pendirian hotel bintang empat dan lima tetap diperbolehkan. Begitu pula akomodasi skala kecil seperti *homestay*, *guest house*, pondok wisata, penginapan dan sebagainya, bisa diajukan. Hanya, syarat yang harus dipenuhi juga tidak mudah. "Kami jaga iklim industri pariwisata supaya tetap kondusif. Tapi lagi-lagi kondisi saat ini sedang tidak berpihak. Darpada membangun, investor mungkin berkeinginan membeli hotel yang sedang dijual," ujarnya.

Moratorium pendirian hotel baru sebenarnya sudah diberlakukan sejak 1 Januari 2014 silam. Namun sebelum diberlakukan moratorium, hingga 31 Desember 2013

terdapat 104 berkas pengajuan yang harus diproses Pemkot. Kemudian mulai 2018 kebijakan pengendalian hotel direvisi. Moratorium hanya diberlakukan bagi hotel bintang tiga ke bawah.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi B, DPRD Kota Jogja Oleg Yohan menilai perpanjangan moratorium hotel baru sudah sangat tepat. Kebijakan moratorium pada dasarnya untuk melindungi industri perhotelan yang saat ini sudah ada. "Itu (diperpanjang) sudah tepat, karena dengan banyaknya hotel saat ini sudah penuh. Apalagi banyak tumbuh kembang hotel manajemen semakin menambah hiruk pikuk perhotelan di kota Jogja," katanya.

Politikus fraksi Nasdem juga menyoroti berkembangnya manajemen virtual hotel yang saat ini telah marak di Kota Jogja. Hal semacam ini juga perlu dilakukan pengawasan. Sebab, bangunan yang diman-

faatkan sebagai akomodasi tidak semua memenuhi syarat atau banyak yang menyalahi peruntukannya. "Misalnya banyak masuk kampung-kampung, itu rumah milik penduduk difungsikan hotel tapi perizinannya tempat tinggal. Karena yang mengelola adalah pihak manajemen virtual, sedangkan yang punya rumah sudah dapat uang sewanya," jabarnya.

Menurut dia, keberadaan hotel manajemen virtual itu bisa merugikan pariwisata. Dan menjadi ancaman bagi keberadaan perhotelan yang sudah jelas mengantongi izin. Terlebih, pihak operator manajemen virtual ditengarai tidak membayarkan pajaknya ke daerah. Pun pada situasi pandemi Covid-19, belum tentu bisa menjamin kenyamanan dan keamanan tamu. "Beda dengan hotel berizin yang punya standar protokol kesehatan ketat dan diverifikasi oleh satgas," imbuhnya. (wia/prg/rg)

1.
2.
3.
4.
5.

lanjut

itanggapi

ketahui

pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 17 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005